

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Takbir Hukum*. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Budi Untung. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta; Penerbit Andi Offset.
- E. Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung; Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta; Konstitusi Press & Citra Media.
- Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bhakti.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Graha Ilmu.
- Kansil, dan Chritine S.T. kansil. *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Pradnya Paramitha.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Per-Undang-Undangan*. Yogyakarta; Kanisius.
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor; Ghalia Indonesia
- Moh Kusnardi, Harmally Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok; Rajawali Pers.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika
- Soehino. 2010. *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta; Penerbit BPFE.
- Syamsuddi. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Cet. I. Jakarta; Sinar Grafika.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2004. *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Wilma Silalahi. 2019. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Depok; Rajawali Pers
- Yos Johan Utama. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Tangerang Selatan; Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SKRIPSI

Azrila Lael. 2024. *Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Hukum*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Athiikah Hanum. Dewi Hariyanti. 2024. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Volume 2 Nomor 2.

Hidayat Pratama Putra. 2020. *Penilaian Terhadap Batal atau tidak sahnya suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan*. Jurnal Hukum Peratun Volume 3 Nomor 1.

Komisi Pemilihan Umum. 2024 *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Papol Pemilu 2024*.

M Agus Maulidi. 2019. *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 16 Nomor 2.

Mustajab, M., & Burlian, P. 2019. *Analisis Hukum Tentang Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia*. Jurnal Raden Fatah. Volume 5 Nomor 1. Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Maharani Nurdin. *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*. Fakultas Hukum; Universitas Singaperbangsa Karawang.

Sekarwidhi, N. 2015. *Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 Dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Di Jawa Tengah*. Journal of Politic and Government Studies. Volume 7 Nomor 3.

Syofyan Hadi dan Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Jurnal Cita Hukum. Volume 5 Nomor 2.

Soehartono. 2012. *Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Yustisia. Volume 1 Nomor 2.

Wahyu Prianto. 2024. *Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan. Volume 2 Nomor 1. Fakultas Hukum; Kendari.

Woro Anjor Verianty. *Pelanggaran Pemilu, Pengertian, Jenis dan Penanganannya Sesuai Undang-Undang*. Diakses pada tanggal 8 November 2024.

TimJDIH Pusat BPK. *Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan KPU

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

SUMBER INTERNET

Meidy Yafeth Tinangon. 2018. *PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan*, <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-Peraturan-Perundangundangan>, Diakses pada tanggal 20 November 2024.

Ahli dan Saksi Anies-Muhaimin Soroti Proses Pencalonan Gibran <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20192> Diakses pada tanggal 9 November 2024
<https://news.detik.com/pemilu/d-7274713/saksi-ganjar-mahfud-sebut-kpu-buat-berita-acara-palsupencalonan-gibran> Diakses pada tanggal 10 November 2024

Gugatan PDIP Soal PKPU Gibran Ditolak Hakim PTUN, Begini Kronologinya <https://www.tempo.co/hukum/gugatan-pdip-soal-pkpu-gibran-ditolak-hakim-ptun-beginikronologinya-1159593> Diakses pada tanggal 12 November 2024

Tri Jata Ayu Pramesti. *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> Diakses pada tanggal 19 November 2023